

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 18  
TAHUN 2023**



**Jln Serdang No 10 F-G Kel. Simpang Tiga Pekan, Kec.  
Perbaungan  
TELEPON: 061-7990620**



## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, PT.BPR NBP 18 wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara berkesinambungan dan didukung oleh integritas dan komitmen yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan tata kelola di lingkungan PT. BPR NBP 18

PT. BPR NBP 18 juga memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan tata kelola sesuai dengan standar tata kelola yang telah diatur Otoritas Jasa Keuangan sehingga PT. BPR NBP 18 dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kabupaten Serdang Bedagai.

PT. BPR NBP 18 telah beroperasi lebih dari 28 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip tata kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong sesuai dengan misi BPR yaitu memenuhi dan mengelola kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan dalam bentuk tabungan, deposito dan pinjaman di setiap jaringan kantor PT. BPR NBP 18, sehingga diperlukan dukungan SDM yang handal dan loyal untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah yang dilayani.

Dalam penerapan GCG, PT. BPR NBP 18 selalu mengacu pada tiga aspek tata kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil tata kelola. Ketiga aspek tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selama tahun 2023, PT. BPR NBP 18 selalu berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan tata kelola yang secara konsisten dan berkelanjutan.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Hardey Sabar MT,SE,SH
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank 2. Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip GCG 3. Menindaklanjuti temuan audit intern dan audit ekstern dari OJK dan Kantor Akuntan Publik 4. Melakukan tugas operasional penyaluran dan penghimpunan dana 5. Melakukan tugas operasional dibidang pengembangan dan SDM			
2.	Nama	:	Rame Tio Bunga Sagala
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan 3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan 4. Melakukan tugas dibidang operasional back office,penagihan, manajemen risiko dan APU PPT			
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
1. Untuk peningkatan kredit BPR melakukan strategi dengan cara penurunan suku bunga sehingga dapat bersaing di pasar dan meluncurkan kredit fintech serta pembiayaan kredit sindikasi. 2. Dalam proses penghimpunan dana BPR tetap berfokus pada dana murah, sehingga tahun 2023 komposisi sumber dana tabungan sebesar 60.17% dan deposito sebesar 39.83% dibandingkan dengan seluruh total dana pihak ketiga. 3. BPR melakukan monitoring kredit NPL setiap harinya dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi debitur sehingga BPR dapat menentukan solusi untuk kredit NPL serta sebagai langkah awal dalam memitigasi risiko yang akan terjadi 4. Dalam menjalankan kegiatan operasional, BPR selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dan apabila terdapat ketentuan terbaru BPR akan menyesuaikannya dengan kegiatan operasional 5. Strategi yang dilakukan BPR dalam memperbaiki kualitas kredit yaitu : melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang masih mencicil setiap bulan, melakukan penagihan team 2 kali dalam 1 minggu, melakukan penjualan agunan secara sukarela,			



melakukan gugatan ke pengadilan negeri, melakukan hapus buku terhadap kredit macet yang tidak memiliki kemampuan bayar dan debitur sudah tidak diketahui keberadaannya. 6. Terhadap kredit yang telah dilakukan hapus buku dan hapus tagih tetap dilakukan penagihan sehingga terjadi penurunan nominal rekening administratif dan data hapus tagih tetap ada pada database namun belum bisa ditampilkan pada laporan Core Banking System. 7. BPR akan konsisten dalam menerapkan program APU PPT dengan cara mengikutsertakan karyawan dalam training APU PPT, melaksanakan rapat terkait perbaikan penerapan pelaksanaan APU PPT, serta melakukan in house training APU PPT.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Joni Cahyono
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi 3. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya 4. Mengawasi Direksi di dalam menjalankan operasional perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi		
2.	Nama	:	Fitriana S,SE
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan/Jenjang 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi 3. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya 4. Mengawasi Direksi di dalam menjalankan operasional perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
1. Meningkatkan penyaluran kredit agar idle money tidak menjadi negatif spread 2. Meningkatkan pertumbuhan sumber dana pihak ketiga baik dari segi nominal maupun rekening untuk mendukung ekspansi kredit yang lebih baik 3. Tetap menjaga kualitas kredit serta terdapat penurunan nominal kredit bermasalah. 4. Meningkatkan monitoring terhadap debitur sebagai salah satu langkah mitigasi risiko terhadap kredit. 5. Memerhatikan ketentuan yang berlaku dalam setiap kegiatan operasional Bank. 6. Melakukan pencatatan terhadap kredit hapus tagih pada System			



7. Melakukan penagihan terhadap kredit bermasalah hapus buku 8. Konsisten dalam melakukan penerapan program APU PPT seperti pengkinian data, rapat operasional, pelatihan internal.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR tidak memiliki komite audit	

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Tidak Ada	

#### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		



	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Tidak Ada			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Hardey Sabar MT,SE,SH	Rp0	0%
2.	Rame Tio Bunga Sagala	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi pada BPR tidak memiliki saham.			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Hardey Sabar MT,SE,SH	-	-	0%
2.	Rame Tio Bunga Sagala	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan
-----	--------------	-------------------



		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Hardey Sabar MT,SE,SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Rame Tio Bunga Sagala	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Terdapat Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.				

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Hardey Sabar MT,SE,SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Rame Tio Bunga Sagala	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Terdapat Hubungan Keluarang Anggota Direksi pada BPR				

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Joni Cahyono	Rp0	0%
2.	Fitriana S,SE	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Komisaris tidak memiliki saham pada BPR			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Fitriana S,SE	601962	PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 9	1.12%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				



## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Joni Cahyono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Fitriana S,SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Joni Cahyono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Fitriana S,SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp866.400.000	2	Rp471.600.000
2.	Tunjangan	2	Rp34.200.000	2	Rp76.128.000
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp900.600.000		Rp547.728.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Nihil					



## 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Perumahan (2)	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan (2)	Asuransi Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Dana Pensiun (2)	Dana Pensiun (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4.1 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio mengalami peningkatan dibandingkan dengan rasio tahun lalu.	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	23 Februari 2023	11	Laporan Perkembangan Usaha, Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Laporan / Temuan Audit Internal
2.	14 April 2023	11	Laporan Perkembangan Usaha, Penyelesaian Kredit Bermasalah, Restrukturisasi Kredit Covid 19 dan Laporan / Temuan Audit Internal
3.	15 Juni 2023	12	Laporan Perkembangan Usaha, Penyelesaian Kredit



			Bermasalah, Laporan Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan Laporan Temuan Audit Internal
4.	07 September 2023	12	Laporan Perkembangan Usaha, Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Laporan / Temuan Audit Internal
5.	29 November 2023	14	Finalisasi RBB Tahun 2024 dan Laporan Kepatuhan, MR, APU PPT
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 5 kali dalam setahun			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Joni Cahyono	2	3	100%
2.	Fitriana S,SE	2	3	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat dilakukan secara telekonferensi dan secara langsung (tatap muka). Untuk komisaris rutin berkunjung secara fisik diluar dari kehadiran rapat.				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Terdapat 1 kasus penyimpangan internal pada Tahun 2023 dan telah diselesaikan segera pada Tahun berjalan.								

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Penjelasan Lebih Lanjut		
Selama tahun 2023 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Selama tahun 2023 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	24 Februari 2023	Sosial	Bakti Sosial Khitanan Massal	Masyarakat Umum	Rp1.000.000
2.	09 Mei 2023	Sosial	Pembangunan Gereja HKBP Pansur Natolu	HKBP Pansur Natolu	Rp1.000.000
3.	21 Juni 2023	Sosial	Pembangunan Gereja HKBP Delitua	HKBP Delitua	Rp2.000.000
4.	03 Juli 2023	Sosial	Kegiatan FORNAS VII 2023 di Jawa Barat	Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia	Rp300.000
5.	26 Juli 2023	Sosial	Pembangunan Konsistori Gereja HKBP Sitinjak Baringin	Gereja HKBP Sitinjak Baringin	Rp500.000



6.	11 Agustus 2023	Sosial	Perayaan 17 Agustus Kecamatan Perbaungan	Kecamatan Perbaungan	Rp300.000
7.	14 Agustus 2023	Sosial	Perayaan 17 Agustus	Ikatan Tunarungu Serdang Bedagai	Rp200.000
8.	15 Agustus 2023	Sosial	Penyelenggaraan Kegiatan Porseni	Gereja GKPS Distrik VIII	Rp200.000
9.	04 September 2023	Sosial	Pembangunan Gereja Katholik Sei Rampah	Gereja Katholik Sei Rampah	Rp1.000.000
10.	25 September 2023	Sosial	Kegiatan Hari Bahasa Isyarat Internasional	Forum Tuna Rungu Sumatera Utara	Rp200.000
11.	27 Oktober 2023	Sosial	Pemberian Bantuan Kepada Nasabah Yang Mengalami Musibah Kebakaran	Nasabah	Rp1.000.000
12.	08 Desember 2023	Sosial	Pemberian Bantuan Kepada Korban Yang Mengalami Musibah Banjir Bandang	Masyarakat Desa Simangulampe	Rp1.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil.					



### BAB III

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18
Alamat	: Jln Serdang No 10 F-G Kel. Simpang Tiga Pekan, Kec. Perbaungan
Nomor Telepon	: 061-7990620
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp7.539.311.638
Total Aset	: Rp74.282.344.059

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18 Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.5 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.46	0.292
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.51	0.227
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	0.150
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.62	0.162
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.45	0.145
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.10	0.028
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.67	0.167
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.75	0.131
10	Rencana Bisnis BPR	1.74	0.131
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.15	0.086
Nilai Komposit			1.500
Predikat Komposit			Sangat Baik

## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.46)**

Jumlah anggota Direksi PT. BPR NBP 18 sebanyak 2 orang yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.51)**

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR NBP 18 sebanyak 2 orang yang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

Sesuai modal inti BPR saat ini yaitu 7.539.311.638 tidak diwajibkan membentuk dan menerapkan komite

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)**

PT. BPR NBP 18 telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah diterapkan secara optimal

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.62)**

PT. BPR NBP 18 telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Undang-Undang lainnya.

### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.45)**

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan laporan hasil audit kepada internal dan kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal

### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)**

KAP sebagai fungsi Audit eksternal telah melaksanakan pemeriksaan untuk tahun buku 2023 berdasarkan surat rekomendasi dari dewan komisaris yang dituangkan dalam RUPS.

### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.67)**

PT. BPR NBP 18 telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan manajemen risiko dalam bentuk profil risiko sebagai umpan balik untuk menaikkan kualitas pengendalian internal.

### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.75)**



PT. BPR NBP 18 telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. BPR dalam menyalurkan kredit dan penyediaan dana tidak melanggar atau pun melampaui BMPK.

#### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.74)**

Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

#### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.15)**

Transportasi kondisi keuangan dan non keuangan PT. BPR NBP 18 telah di dukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. PT. BPR NBP 18 juga telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan.

### **C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian penerapan tata kelola, disimpulkan bahwa :

Faktor positif aspek struktur tata kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek struktur tata kelola adalah bahwa untuk mendukung operasional BPR masih dibutuhkan peningkatan kualitas SDM sehingga mampu mengisi suatu fungsi atau unit apabila terjadi kekosongan posisi.

Selanjutnya faktor positif aspek tata proses tata kelola adalah tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor negatif aspek proses tata kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator

Selanjutnya faktor positif aspek hasil tata kelola adalah Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat berkinerja dengan baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usahanya. Sementara faktor negatif aspek tata kelola adalah penerapan kebijakan strategis SDM belum terlaksana secara optimal sehingga perlu ditingkatkan konsistensi terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang telah diambil oleh Direksi.




Perbaungan, 24 Januari 2024

**PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18**



bank nbp  
pt bpr nbp 18

  
**Hardey Sobar MT, SE, SH**  
Direktur Utama

  
**Rame Tio Bunga Sagala**  
Direktur

Disetujui Oleh

  
**Joni Cahyono**  
Komisaris Utama



# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666251-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601873-25012024121250

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bpr\_nbp18@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-25 12:12:50



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.